

BAB III.

KEBIJAKAN SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. Pelaksanaan kebijakan sekolah gratis

Dalam penyelenggaraan program sekolah gratis di provinsi Sumatra selatan dibentuk organisasi pelaksana yang terdiri dari :

A. Oraganisasi Pelaksana Pasal 2

a. Tim Pengarah :

1. Tim pengarah provinsi, terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Bappeda Provinsi.
2. Tim pengarah Kabupaten/Kota, terdiri dari Bupati/Walikota, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan kepala Bappeda kabupaten/kota.

b. Tim Manejemen :

1. Tim manajemen Provinsi, Terdiri dari :
 - a) Penanggung Jawab, yaitu :
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 - 2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
 - a) Tim Pelaksana, yaitu :
 - 1) Ketua Tim (unsur Dinas Pendidikan Provinsi)

- 2) Wakil Ketua I (unsure Dinas Pendidikan Provinsi)
 - 3) Wakil Ketua II (unsur Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi)
 - 4) Sekretaris (pejabat pelaksana teknis kegiatan)
 - 5) Bendahara Pembantu (Dinas Pendidikan Provinsi)
 - 6) Seksi Data (Dinas Pendidikan Provinsi dan kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi)
 - 7) Seksi Monitoring (Dinas Pendidikan)
3. Tim Manejemen Kabupaten/Kota terdiri dari :
- a) Penanggung Jawab, yaitu :
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota
 - 2) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota.
 - b) Tim Manejemen, Yaitu :
 - 1) Ketua Tim (unsur Dinas Pendidikan kabupaten/kota)
 - 2) Wakil Ketua I (unsur Dinas Pendidikan kabupaten/kota)
 - 3) Wakil Ketua II (unsur Kantor Wilayah Departemen Agama kabupaten/kota)
 - 4) Sekretaris (pejabat pelaksana teknis kegiatan)
 - 5) Bendahara Pembantu (Dinas Pendidikan kabupaten/kota)
 - 6) Seksi Data (Dinas Pendidikan Provinsi dan kantor Wilayah Departemen Agama kabupaten/kota)
 - 7) Seksi Monitoring (unsur Dinas Pendidikan kabupaten/kota)
4. Tim Manejemen pada Tingkat Sekolah/madrasah, terdiri dari :
- a) Kepala sekolah/Madrasah sebagai ketua

- b) Wakil Kepala Sekolah sebagai wakil ketua
- c) Guru/ Tenaga Administrasi sebagai Bendahara
- d) Satu orang anggota Komite sebagai anggota

B. Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 3

(1) Tim Pengarah mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan program sekolah gratis.

(1) Tim Manejemen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Tim Manejemen Provinsi :

1. Menetapkan alokasi bantuan tiap kabupaten/kota
2. Mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di provinsi
3. Mempersiapkan daftar alokasi satuan kegiatan sesuai dengan dana kegiatan yang telah ditetapkan
4. Merencanakan dan melakukan sosialisasi ditingkat provinsi
5. Mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen Kabupaten/ Kota
6. Melakukan pendataan dana sosialisasi
7. Melakukan dana ke sekolah/madrasah
8. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Manajen kabupaten/ kota dalam penyaluran dana
9. Mengumumkan nama sekolah/madrasah/ponpes penerima bantuan
10. Merenakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
11. Memberikan pelayanan pengaduan masyarakat
12. Bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat provinsi

13. Melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur
14. Mengembalikan sisa dana ke kas daerah sesuai ketentuan
 - a. Tim Manajemen Kabupaten/kota
 1. Menetapkan alokasi bantuan tiap sekolah/madrasah
 2. Mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di kabupaten/kota
 3. Mempersiapkan Daftar Alokasi Satuan Kegiatan sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan
 4. Merencanakan dan melakukan sosialisasi tingkat sekolah/madrasah
 5. Menyalurkan dana ke sekolah/madrasah
 6. Melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur dalam penyaluran dana
 7. Mengumumkan nama sekolah/madrasah/ponpes/ penerima bantuan
 8. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
 9. Memberikan pelayanan pengaduan masyarakat
 10. Bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat kabupaten/kota
 11. Melaporkan kegiatan yang dilakukan ke Bupati/Walikota dan Tim Manajemen Provinsi
 12. Mengembalikan sisa dana ke kas daerah sesuai ketentuan
 - a. Tim Manajemen Sekolah/Madrasah
 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang terima dengan data siswa yang ada, dan bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke Tim Manajemen Provinsi atau Tim Manajemen Kabupaten/Kota

2. Mengelola dana program sekolah gratis secara transparan dan tanggung jawab
3. Mengumumkan komponen penggunaan dana di papan pengumuman sekolah/madrasah/ponpes
4. Bertanggung jawab terhadap kasus penyimpang di tingkat sekolah/madrasah/ponpes
5. Memberikan pelayanan dan penegangan pengaduan msyarakat
6. Melaporkan penggunaan dana kepada Tim manajemen kabupaten/kota.
(Sumber Peraturan Gubernur Sumatra Selatan)

Dengan adanya pelaksanaan kebijakan sekolah gratis yang telah diluncurkan pemerintah daerah Sumatra selatan telah memberikan respon masyarakat terhadap penyelenggaraan program sekolah gratis dengan mengacu hasil wawancara dari kepala sekolah SMA N 1 Keluang dengan format pertanyaan ke sebelas, sebagai berikut :

Setuju semua. Karena sekolahnya gratis bebas dari biaya SSP dan pungutan sekolah. (Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal 09 Februari 2012)

Dengan demikian bahwa dapat diketahui respon warga terhadap program sekolah gratis bahwa sangat membantu bagi masyarakat terutama masyarakat kurang mampu maupun yang mampu sehingga semua warga antusias untuk menyekolahkan anak mereka kejenjang Sekolah Menengah Atas.

Sekolah gratis adalah sekolah yang di bebaskan dari biaya bayaran bulanan yang lebih dikenal dengan biaya SPP dan pungutan lainnya, sehingga sangat membantu orang tua maupun masyarakat yang berpenghasilan ekonomi rendah dengan mengacu hasil wawancara dari kepala sekolah SMA N 1 Keluang dengan format pertanyaan ke dua belas, sebagai berikut :

Ya. karena orang tua merasa terbantu dari biaya kewajiban membayar SSP dan biaya pungutan lainnya. (Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal 09 Februari 2012)

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dengan adanya program sekolah gratis yang di selenggrakan pemerintah daerah Sumatra selatan sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dengan berpenghasilan ekonomi rendah dengan biaya kehidupan sehari-hari yang pas-pasan buat keluarga.

Sebagai salah satu daerah yang telah melakukan program sekolah gratis sehingga banyak mendapat respon positif dari masyarakat baik dalam pelaksanaannya maupun tujuan dari program ini sebagai pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai menengah sehingga sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu, dengan melihat perbandingan hasil wawancara kepada orang tua wali murid dengan pertanyaan ke 1, sebagai berikut :

1. Sangat setuju, dengan adanya program sekolah gratis ini karena sangat membantu bagi masyarakat yang susah. (Wawancara dengan bapak Zulkarnain 27 Februari 2012)

2. Sangat bagus, karena sangat membantu masyarakat/orang tua yang kurang mampu untuk membiayai sekolah. (Wawancara dengan bapak Sudirman 27 Februari 2012)
3. Sangat setuju, karena dengan program sekolah gratis ini sangat membantu bagi masyarakat yang untuk menyekolahkan anak mereka. (Wawancara dengan bapak Muksin Alatas 27 Februari 2012)
4. Lebih sangat setuju, karena sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menyekolahkan anak mereka. (Wawancara dengan bapak Kailani 27 Februari 2012)
5. Setuju, karena sangat membantu bagi masyarakat yang susah. (Wawancara dengan bapak Muhammad Guntur 27 Februari 2012)

Dengan mengamati hasil dari wawancara kepada orang tua wali murid bahwa semua orang tua wali murid semua setuju dengan adanya program sekolah gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin ini karena sangat membantu bagi masyarakat yang susah dalam membiayai sekolah anak mereka

2. Tujuan pendidikan di SMA N 1 Keluang

Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang dimana telah menyesuaikan dengan visi, misi dan tujuan sekolah dalam melayani dan mendidik siswa agar mengembangkan sikap berbudi pekerti luhur dan mengembangkan daya pikir secara maksimal sehingga mengarahkan siswa agar mempunyai kecakapan hidup sesuai dengan bakat minatnya sehingga dapat mandiri setelah tamat dari SMA 1 Negeri Keluang. Dengan menyediakan tempat bekerja guru dan tempat belajar bagi siswa yang nyaman dan memadai sehingga mutu pendidikan dapat meningkat dan tercapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Dan menciptakan suasana sekolah yang

kondusif nyaman, aman, tertib, rukun melalui perilaku yang terbuka dan jujur kepada sesama.

Adapun mengenai tujuan pendidikan sekolah gratis di SMA N 1 Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana mengacu dari hasil wawancara yang peneliti lakukan berdasarkan format pertanyaan kesatu, sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA N 1 Keluang sebagai berikut:

1. Untuk dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar pendidikan bagi anak usia sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, dengan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2009 tanggal 19 maret 2009 pemerintah provinsi Sumatra selatan telah menetapkan program sekolah gratis di provinsi Sumatra selatan
2. Untuk meningkatkan mutu pendidikan serta kelancaran proses belajar mengajar dan guna mengurangi beban orang tua siswa terhadap biaya pendidikan sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bidang pembangunan pendidikan, (Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal 09 Februari 2012)

Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan program sekolah gratis adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan sehingga memberikan keringanan beban ekonomi bagi masyarakat yang berpenghasilan ekonomi rendah.

Dengan adanya program sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin dimana sekolah telah di gratiskan dan tidak diwajibkan untuk mengambil bayaran bulan SPP maupun pungutan lainnya. Sehingga minat untuk

menyekolahkan anak mereka sangat di respon karena sekolahnya tidak bayar walaupun bayar minat untuk menyekolahkan anak mereka sangat antusias dengan mengacu pada hasil wawancara pada orang tua murid dengan format pertanyaan ke 3, sebagai berikut :

1. Sangat berminat, walaupun sekolahnya tidak gratis/bayar. (Wawancara dengan bapak Zulkarnain 27 Februari 2012)
2. Sangat berminat, karena dengan adanya program sekolah gratis telah memberi kesempatan orang yang susah untuk menyekolahkan anak mereka. (Wawancara dengan bapak Sudirman 27 Februari 2012)
3. Ya Sangat berminat, karena dengan adanya program sekolah ini sangat membantu dalam hal memberikan pemerataan pendidikan bagi masyarakat yang susah dalam hal menyekolahkan anak mereka. (Wawancara dengan bapak Muksin Alatas 27 Februari 2012)
4. Ya sangat berminat untuk menyekolahkan walaupun sekolahnya tidak gratis. (Wawancara dengan bapak Kailani 27 Februari 2012)
6. Sangat berminat, walaupun sekolahnya tidak gratis. (Wawancara dengan bapak Muhammad Guntur 27 Februari 2012)

Dari hasil wawancara dengan para orang tua murid dapat disimpulkan bahwa semua orang tua murid sangat berminat menyekolahkan anak mereka walaupun sekolahnya tidak gratis mereka akan tetap mau menyekolahkan anak mereka.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya kebijakan sekolah gratis

Faktor adalah salah satu sarana untuk melakukan suatu perubahan yang didukung oleh peran kebijakan pemerintah dalam hal menanggulangi faktor-faktor yang menghambat kelancaran pendidikan, sehingga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pembiayaan biaya pendidikan. Adapun

faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

1. Salah satunya faktor ekonomi yaitu ketidakmampuan membiayai sekolah sehingga banyak anak yang *out* dari sekolah karena tidak bisa membayar biaya pendidikan.
2. Selanjutnya, permasalahan yang juga sangat krusial adalah masalah biaya pendidikan yang semakin lama semakin mahal. Setiap jenjang pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, untuk tingkat Taman Kanak-Kanak saja, biaya jauh lebih mahal daripada sekolah lanjutan, bahkan menyaingi biaya untuk pendidikan di universitas. Selalu ada banyak alasan sehingga dibutuhkan banyak biaya yang lebih besar setiap tahunnya. Setiap orang tua selalu berusaha agar anak-anaknya dapat mengikuti proses pendidikan hingga tingkat tinggi. Mereka tidak peduli seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Hal terpenting yang menjadi pemikiran mereka adalah masa depan anak-anaknya. Mereka yakin bahwa untuk mengikuti proses pendidikan memang dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.
3. Dan tidak sedikit sekolah yang masih memungut dana bangunan kepada anak didik di awal tahun ajaran baru, khususnya kelas satu, padahal gedung mereka sudah megah. Dari khusus tersebut, kita melihat bahwa yang paling besar melakukan pemungutan dana bangunan adalah sekolah negeri. Selama ini, yang menjadi sorotan masyarakat justru sekolah negeri yang

sudah mendapatkan banyak pembiayaan dari pemerintah, ternyata justru membebani masyarakat dengan biaya pendidikan yang sedemikian beratnya. Hal inilah yang jika telah menjadi sumber permasalahan sehingga banyak anak-anak dari keluarga miskin tidak dapat menikmati peluang pendidikan disekolah negeri. Padahal, seharusnya, tujuan pemerintah mendirikan sekolah negeri adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu.

4. Anak dari keluarga kaya justru menguasai sekolah negeri dan anak-anak orang kurang mampu terdepak dari kesempatan belajar di sekolah negeri. Akhirnya, anak-anak orang kurang mampu harus menempuh pendidikan di sekolah-sekolah swasta. Dalam hal ini faktor pembiayaannya ditanggung oleh masyarakat. Artinya, agar dapat melakukan proses pendidikan dan pembelajaran, sekolah swasta membutuhkan masukan dana dari masyarakat. Masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya harus membayar sejumlah uang setiap bulannya sebagai bentuk partisipasi pendidikan, yaitu Sumbangan Pembangunan Pendidikan atau SSP. Belum lagi, mereka harus menyediakan dana untuk pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pembelajaran di sekolah tersebut. (Muhammad Saroni 2010 :23-26)

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin, di lihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan

berdasarkan format pertanyaan ke empat, sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA N 1 Keluang sebagai berikut:

Salah satu persoalan krusial yang menyebabkan adanya program sekolah gratis adalah faktor kesulitan ekonomi dan ketidak mampuan orang tua membiayai sekolah. Yang mengakibatkan banyak anak usia sekolah yang putus sekolah karena tidak bisa membiayai sekolah. (Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal 09 Februari 2012)

Jadi demikian dapat diketahui bahwa faktor ekonomilah yang menjadikan adanya program sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga pemerintah daerah menyelenggarakan sekolah gratis.

Dengan program sekolah gratis yang telah dilaksanakan pemerintah daerah telah mengurangi beban orang tua murid dengan mengacu wawancara bapak kepala sekolah SMA N 1 Keluang dengan format pertanyaan ke empat belas, sebagai berikut :

Ya, terutama dari biaya SSP dan biaya operasional lainnya (pungutan) karena pemerintah tidak membenarkan. (Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal 09 Februari 2012)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan program sekolah gratis yang dilaksanakan pemerintah daerah provinsi Sumatra selatan telah sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai sekolah.

Tujuan diadakan program sekolah gratis adalah untuk mengurangi beban orang tua wali murid dalam menyekolahkan anak mereka sehingga program sekolah gratis ini sangat di respon positif oleh masyarakat dan sangat

Yaitu berdasarkan pedoman peraturan Gubernur Sumatra Selatan nomor 31 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di provinsi Sumatra selatan. (Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal 09 Februari 2012)

Adapun ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah provinsi Sumatra selatan yaitu : Peraturan Gubernur Sumatra Selatan nomor 31 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di provinsi Sumatra selatan, yang memuat peraturan dan pelaksanaan sekolah gratis di provinsi Sumatra selatan. Sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah pemerintah pusat.
2. Provinsi adalah pemerintah provinsi Sumatra selatan.
3. Pemerintah provinsi pemerintah provinsi Sumatra selatan
4. Gubernur adalah gubernur sumatra selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi sumatra sealatan.
6. Pemerintah Kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota se-sumatra sealatan
7. Bupati/Walikota adalah bupati walikota se-sumatra selatan
8. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta adalah SD/SDL/MI di Sumatra selatan

9. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs di Sumatra selatan.
10. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta adalah SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/Swasta adalah SMA/SMALB/MA/SMK di Sumatra selatan.
11. Sekolah Standar Nasional yang selanjutnya di singkat SSN adalah sekolah negeri maupun swasta yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan daya saing nasional.
12. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya di singkat RSBI adalah sekolah yang sudah memnuhi standar nasional pendidikan yang Persiapkan untuk menjadi sekolah bertaraf internasional.
13. Sekolah Bertaraf Internasional yang diselanjutya di singkat SBI adalah Nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Pendidikan (SNP) Indonesia dan tarafnya internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan daya saing internasional.
14. Kelompok Belajar Paket yang selanjutnya di sebut kejar paket adalah masyarakat yang di fasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah/madrasah, yang meliputi Kejar Paket A setara SD/MI, kejar paket B setara SMP/Mts, dan Kejar Paket C SMA/MA.

15. Pendidikan Diniyah adalah keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan nonformal dan informal.
16. Sekolah Gratis adalah program untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.
17. Biaya Operasional Sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari:
 - a. Biaya personal meliputi biaya kesejahteraan guru, pengawai, pengembangan profesi guru : dan
 - b. Biaya non personal meliputi penerimaan siswa baru/ daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, dan alat tulis kantor.
18. Tim Manejemen Program Sekolah Gratis adalah pengelola program sekolah gratis yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi dan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Adapun mengapa ada kebijakan sekolah gratis di SMA N 1 Keluang dengan mengacu hasil wawancara dengan kepala sekolah dengan format pertanyaan ke tujuh, sebagai berikut :

Karena SMA N 1 Keluang, termasuk wilayah dari provinsi Sumatra selatan, dimana provinsi ini telah menyelenggarakan program sekolah gratis sehingga kebijakan tersebut harus di ikuti semua sekolah yang ada di provinsi Sumatra selatan. (Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal 09 Februari 2012)

Dengan demikian semua sekolah negeri yang ada di provinsi selatan harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan pedoman peraturan Gubernur Sumatra Selatan nomor 31 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di provinsi Sumatra selatan.

Maka timbullah program sekolah gratis di Provinsi Sumatra Selatan dengan ketentuan berdasar Peraturan Gebernur Sumatra Selatan NO 31 Tahun 2009, bahwa mulainya program sekolah gratis di selenggrakan seprovinsi Sumatra selatan pada tahun tahun 2009, dengan mengacu hasil wawancara terhadap bapak kepala sekolah SMA N 1 Keluang dengan format pertanyaan ke delapan, sebagai berikut :

Pada tahun 2009 Pemerintah provinsi Sumatra selatan telah menetapkan program sekolah gratis di seluruh provinsi Sumatra selatan bagi sekolah negeri dan Swasta. (Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal 09 Februari 2012)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tahun 2009 Pemerintah provinsi Sumatra Selatan telah melaksanakan program sekolah gratis dengan membebaskan biaya sekolah baik yang Negeri maupun Swasta.

Selama pelaksanaan program sekolah gratis di SMA N 1 Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, adakah kendala-kendala yang menghambat dalam melaksanakan program sekolah gratis di SMA N Keluang dengan mengacu

hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA N 1 Keluang dengan format pertanyaan ke sepuluh, sebagai berikut :

Tidak ada kendala atau pun hambatan karena sudah ada pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis yang telah dikeluarkan pemerintah provinsi Sumatra selatan. (Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal 09 Februari 2012)

Dengan demikian semua sekolah telah mendapatkan pedoman, aturan tentang penyelenggaraan program sekolah gratis di Sumatra selatan sehingga tidak ada kesulitan dalam pelaksanaannya karena sudah berdasarkan pedoman

Sekolah merupakan lembaga pendidikan dimana untuk melaksanakan program sekolah gratis banyak membutuhkan pendanaan untuk memajukan lembaga sekolah sehingga pemerintah telah menyediakan dana sebagaimana mengacu pada hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah SMA N 1 Keluang dengan format pertanyaan ke 2, sebagai berikut :

Asal dana yang digunakan untuk melaksanakan program sekolah gratis diambil dari program APBD Sumatra Selatan. (Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal 09 Februari 2012)

Dengan mengulas hasil wawancara dengan bapak kepala SMA N 1 Keluang bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan program sekolah gratis telah mendapat bantuan dana dari program APBD Sumatra Selatan.

Dana merupakan salah satu sentral yang memberikan kelancaran dalam pembangunan bidang pendidikan baik dalam bidang prasarana untuk kelancaran proses belajar serta kegiatan seperti ulangan mid semester, ulangan

semester, remedial dan ekstrakurikuler maupun juga mengaji guru yang masih honorer guru, karyawan dan lain-lainya. Dengan mengacu pada hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah SMA N 1 Keluang dengan format pertanyaan ke 3, sebagai berikut :

Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk SMA N 1 Keluang, yang telah ditetapkan besarnya, Sebagai dana untuk kegiatan proses belajar mengajar di SMA N 1 Keluang :

Rp. 32. 000, Tahun 2009

Rp. 32. 000, Tahun 2010

Rp. 36. 000, Tahun 2011/2012

(Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal 09 Februari 2012)

Berdasarkan tingkatan jenjang pendidikan setiap dana yang dikeluarkan telah berdasarkan penetapan surat keputusan bupati musi banyuasin tentang penetapan sekolah-sekolah penerima dana sekolah gratis (bantuan provinsi) SD,SMP,SMA, dan SMK Negeri. Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan adanya pendanaan yang telah ditetapkan/dikeluarkan pemerintah daerah dalam hal untuk menganggarkan dana untuk setiap sekolah sebagai dana untuk mempelancar kegiatan proses belajar mengajar di lembaga sekolah, dengan melihat hasil dari wawancara dengan kepala sekolah SMA N 1 Keluang dengan pertanyaan ke 6 sebagai berikut :

Ya, sesuai setiap Dana Sekolah gratis masing-masing ditetapkan besarnya dengan pembagaian.

Sebagai Dana untuk kegiatan proses belajar mengajar :

Untuk Sekolah Negeri

SD Negeri = Rp. 4000. selama 12 bulan

SMP Negeri = Rp. 6000. selama 12 bulan

SMA Negeri = Rp. 36.000. selama 12 bulan

SMK Negeri = Rp. 40.000. selama 12 bulan
(Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal
09 Februari 2012)

Sekolah adalah lembaga pendidikan dimana sekolah telah menetapkan berbagai disiplin peraturan sehingga dalam melaksanakan program sekolah gratis pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada sehingga dalam pelaksanaan program sekolah telah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah SMA N Keluang dengan pertanyaan ke enam, sebagai berikut :

Ya, yaitu berdasarkan peraturan Gubernur Sumatra Selatan nomor 31 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di provinsi Sumatra selatan. (Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal 09 Februari 2012)

Dengan mengacu hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah bahwa dalam melaksanakan program sekolah gratis setiap sekolah telah ditetapkan dengan peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah provinsi Sumatra Selatan yaitu pedoman peraturan Gubernur Sumatra Selatan nomor 31 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di provinsi Sumatra selatan.

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang dimananya membutuhkan siswa dalam melakukan proses belajar mengajar dikelas sehingga dalam suatu lembaga pendidikan bersaing dalam memberikan layanan pendidikan sehingga

banyak orang tua siswa tertarik untuk menyekolahkan anak mereka juga tidak banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak mereka, sehingga ada kenaikan jumlah siswa apalagi sekarang sudah ada program sekolah gratis dimana sekolah tidak di bolehkan mengambil bayaran bulanan yaitu SPP maupun pungutan lainnya, dengan mengacu hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah SMA N 1 Keluang dengan format pertanyaan ke tiga belas, sebagai berikut :

Seharusnya iya, Tetapi karena berdirinya SMA baru, yaitu SMA N 2 Keluang, Maka jumlah total siswa tidak mengalami kenaikan jumlah siswa di SMA N 1 keluang. (Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warih Susiawan, tanggal 09 Februari 2012)

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA N 1 Keluang bahwa kenaikan jumlah siswa seharusnya meningkat di SMA N 1 Keluang tetapi karena ada SMA N 2 Keluang yang baru dibuka sehingga tidak ada kenaikan jumlah siswa di SMA N 1 Keluang.

5. Pembahasan

Hasil penelitian yang didapat dari lapangan dengan Kepala Sekolah SMA N 1 Keluang melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti dapat mengungkap bahwa:

A. Pelaksanaan kebijakan Sekolah Gratis di Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti dari lapangan menunjukkan bahwa SMA N 1 Keluang adalah bagian dari wilayah provinsi sumatra selatan dimana pemerintah daerah provinsi sumatra selatan telah menerapkan kebijakan sekolah gratis sehingga SMA N 1 Keluang harus mengikuti program tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatra Selatan NO 31 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di provinsi sumatra selatan, dengan ketentuan berikut:

1. Mengenai tujuan Pendidikan sekolah Gratis di provinsi sumatra selatan
2. Memuat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di adakan sekolah gratis di provinsi sumatra selatan
3. Bab I memuat ketentuan umum yaitu tentang penjelasan isi pokok Peraturan Gubernur Sumatra Selatan NO 31 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di provinsi sumatra selatan
4. Bab II memuat tentang orgnisasi pelaksana, tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Organisasi pelakasana terdiri dari:
 1. Tim pengarah
 2. Tim manajemen
 3. Tim manajemen Kabupaten/Kota
 4. Tim manajemen pada tingkat Sekolah/Madrasah

b. Tugas dan tanggung jawab terdiri dari:

1. Tim manajemen provinsi
 2. Tim manajemen Kabupaten/Kota
 3. Tim manajemen Sekolah/Madrasah
5. Bab III memuat tentang pendanaan terdiri dari enam (6) bagian yaitu:
1. Pengelokasian dana
 2. Penyaluran dana
 3. Pengambilan dana
 4. Penggunaan dana
 5. Memuat hal-hal yang dilarang dalam pengambilan dana program sekolah gratis
 6. Memuat hal-hal lain yang berhubungan dengan dana program sekolah gratis
6. Bab IV memuat tentang tata tertib pengelolaan program sekolah gratis terdiri dari:
1. Tim manajemen provinsi
 2. Tim manajemen Kabupaten/Kota
 3. Tim manajemen Sekolah/Madrasah/Ponpes
7. Bab V memuat tentang monitoring, pengawasan dan pelaporan
8. Bab IV penutup